

Paradigma Politik Muhammadiyah

Jaminan Kepuasan

Apabila Anda mendapatkan buku ini dalam keadaan cacat produksi (di luar kesengajaan kami), seperti halaman kosong atau terbalik, silakan ditukar di toko tempat Anda membeli atau langsung kepada kami dan kami akan menggantinya segera dengan buku yang bagus.

Ridho Al-Hamdi

Paradigma Politik Muhammadiyah

(Epistemologi Berpikir dan Bertindak Kaum Reformis)



IRCiSoD

PARADIGMA POLITIK MUHAMMADIYAH

Penulis: Ridho Al-Hamdi
Editor: Muhammad Ali Fakhri
Tata Sampul: Alfin Rizal
Tata Isi: Atika
Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Juli 2020

Penerbit
IRCiSoD
Sampangan Gg. Perkutut No.325-B
Jl. Wonosari, Baturetno
Banguntapan Yogyakarta
Telp: (0274) 4353776, 081804374879
Fax: (0274) 4353776
E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com
sekred.divapress@gmail.com
Blog: www.blogdivapress.com
Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Hamdi, Ridho

Paradigma Politik Muhammadiyah/Ridho Al-Hamdi; editor, Muhammad Ali Fakhri—cet. 1—Yogyakarta:
IRCiSoD, 2020

510 hlmn; 15,5 x 24 cm
ISBN 123-456-789-9

I. Religion & Spirituality
II. Muhammad Ali Fakhri

I. Judul

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Nama-nama Ketua Umum Muhammadiyah sejak 1912 hingga 2020.	43
Tabel 1.2	Nama Permusyawaratan Tertinggi di Muhammadiyah 1912–2020.	46
Tabel 3.1	Sumber Pembentukan Kesadaran Politik Muhammadiyah.	82
Tabel 3.2	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1912–1918.	87
Tabel 3.3	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1918–1919.	98
Tabel 3.4	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1919–1920.	99
Tabel 3.5	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1921–1922.	90
Tabel 3.6	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1922–1923.	92
Tabel 3.7	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1923–1924.	93
Tabel 3.8	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1924–1925.	94
Tabel 3.9	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1925–1926.	95
Tabel 3.10	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1929–1930.	100
Tabel 3.11	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1932 dan Perubahannya.	101
Tabel 3.12	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1932–1934.	102

Tabel 3.13	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1934–1936.	103
Tabel 3.14	Struktur Hoofdbestuur Muhammadiyah Periode 1937–1938.	104
Tabel 3.15	Struktur Kepengurusan Partai Islam Indonesia (PII) Pertama Tahun 1938.	115
Tabel 3.16	Struktur Pengurus Besar Muhammadiyah Era Dai Nippon Periode 1942–1944.	121
Tabel 3.17	Struktur Pengurus Besar Muhammadiyah Era Dai Nippon Periode 1944–1946.	122
Tabel 3.18	Struktur Kepengurusan MIAI Tahun 1940.	124
Tabel 3.19	Struktur Kepengurusan Masyumi Jepang Tahun 1941.	125
Tabel 3.20	Struktur Pengurus Besar Muhammadiyah Periode 1946–1950.	147
Tabel 3.21	Struktur Pengurus Besar Muhammadiyah Periode 1950–1953.	148
Tabel 3.22	Struktur Pusat Pimpinan Muhammadiyah Periode 1953–1956.	152
Tabel 3.23	Hasil Pemilu 1955 untuk DPR RI dan Majelis Konstituante.	156
Tabel 3.24	Struktur Pusat Pimpinan Muhammadiyah Periode 1956–1959.	158
Tabel 3.25	Struktur Pimpinan Pusat Masyumi Pertama (1945).	167
Tabel 3.26	Struktur Pemimpin Pusat Masyumi Kedua (1949).	168
Tabel 3.27	Struktur Pimpinan Pusat Masyumi Ketiga (1951).	170
Tabel 3.28	Struktur Pimpinan Pusat Masyumi Keempat (1952).	171
Tabel 3.29	Struktur Pimpinan Pusat Masyumi Kelima (1954).	171
Tabel 3.30	Struktur Pimpinan Pusat Masyumi Keenam (1956).	172
Tabel 3.31	Struktur Pimpinan Pusat Masyumi Ketujuh (1959).	173
Tabel 3.32	Keterlibatan Kader-kader Muhammadiyah di Struktur PP Masyumi 1945–1959.	174
Tabel 3.33	Kader-kader Muhammadiyah yang Menjabat sebagai Menteri Era Orde Lama.	176
Tabel 3.34	Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1959–1962.	196
Tabel 3.35	Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1962–1965.	202

Tabel 3.36	Struktur PP Muhammadiyah Periode 1965–1968.	207
Tabel 3.37	Kepengurusan Pimpinan Pusat Parmusi Pertama (1968).	220
Tabel 3.38	Kepengurusan Majelis Hikmah PP Muhammadiyah Periode 1965–1968.	226
Tabel 3.39	Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1968–1971.	227
Tabel 3.40	Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1968–1971.	228
Tabel 3.41	Hasil Pemilu 1971.	233
Tabel 3.42	Struktur Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1995–2000.	261
Tabel 3.43	Struktur Dewan Pimpinan Pusat PAN Pertama 1998.	277
Tabel 3.44	Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 1999.	281
Tabel 3.45	Empat Alternatif Rumusan Dasar Negara yang Muncul dalam Sidang Tahunan MPR.	286
Tabel 3.46	Perolehan Suara Pada Putaran Pertama Pilpres 2004	306
Tabel 3.47	Struktur Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Pertama 2006.	319
Tabel 3.48	Perolehan Suara PMB Per Dapil pada Pemilihan Legislatif 2019.	323
Tabel 3.49	Survei Peta Dukungan Warga Muhammadiyah terhadap Capres–Cawapres 2014.	328
Tabel 3.50	Survei Peta Dukungan Warga Muhammadiyah terhadap Capres–Cawapres 2019.	330
Tabel 3.51	Kader-kader Muhammadiyah yang Menjadi Anggota DPR RI 1999–2004.	336
Tabel 3.52	Kader-kader Muhammadiyah yang Menjadi Anggota DPR RI 2004–2009.	338
Tabel 3.53	Kader-kader Muhammadiyah yang Menjadi Anggota DPR RI 2009–2014	340
Tabel 3.54	Kader-kader Muhammadiyah yang Menjadi Anggota DPR RI 2014–2019	342
Tabel 3.55	Kader-kader Muhammadiyah yang Menjadi Anggota DPR RI 2019–2024	343
Tabel 3.56	Kader dan Anggota Muhammadiyah yang Masuk di Kabinet Era Reformasi	345

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Lambang Sarekat Islam	86
Gambar 3.2	Lambang Partai Masyumi	146
Gambar 3.3	Lambang Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)	220
Gambar 3.4	Lambang Partai Amanat Nasional (PAN)	276
Gambar 3.5	Lambang Partai Matahari Bangsa (PMB)	336
Gambar 3.6	Perjalanan Pembentukan Kesadaran Politik Muhammadiyah	318
Gambar 5.1	Tiga Dimensi dalam Paradigma Politik Muhammadiyah	399

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, buku ini akhirnya selesai dan dapat dinikmati para pembaca. Buku ini berawal dari gagasan penulis pada awal 2018 tentang perlunya referensi babon tentang Muhammadiyah dan politik yang ditinjau secara filosofis. Karena itulah, muncul gagasan penelitian tentang epistemologi politik Muhammadiyah. Sejak saat itu, penulis mencoba mengumpulkan berbagai referensi dan diskusi dengan sejumlah pihak tentang perlunya telaah terhadap topik ini. Namun, di tengah kesibukan akademik dan aktivitas sosial lainnya, gagasan ini muncul dan tenggelam hingga akhirnya pada akhir 2018, penulis mencoba memulai mengonseptualisasi proposal penelitian untuk diusulkan pada program Hibah RisetMu Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Akhirnya, proposal penelitian ini diterima dan didanai.

Penulis pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang telah menerima proposal penelitian ini dan memberikan dana hibah guna penyelesaian seluruh rangkaian penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan PP Muhammadiyah dan Perpustakaan Suara Muhammadiyah, serta Rizki Dewantoro dan Arif “Adim” Budiman yang membantu proses pengumpulan data dan arsip lama. Juga, asisten yang bersedia mengetik ulang arsip-arsip lama: Nawang Kurniawati dan Adibah Dhivani Gusmi.

Tentu, penulis juga berterima kasih kepada semua narasumber studi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya guna memperkaya perspektif studi ini. Nama-nama narasumber telah disebutkan pada bagian Bab 1. Terima kasih juga disampaikan kepada redaksi Suara Muhammadiyah dan Pusat Studi Muhammadiyah (PSM) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang telah memfasilitasi

forum Diskusi Kelompok Terumpun (FGD) terkait hasil studi ini dengan sejumlah ahli. Meskipun mereka berkontribusi terhadap studi ini, namun tanggung jawab isi tetap berada pada pribadi penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Moh. Mudzakkir dan Rizki Dewantoro atas kontribusi *draft* tulisan di bagian tertentu dari studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Ahmad Syafi'i Ma'arif, MA dan Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si atas kesediaannya menulis kata pengantar untuk buku ini di tengah kesibukannya sebagai tokoh umat dan bangsa. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Penerbit Diva Press yang telah bersedia menerbitkan naskah yang cukup tebal ini. Terakhir, ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk keluarga tercinta, terutama istri (Chusnul Septina Ari) dan anak-anak (Queen Nabihosophie al-Hamdi dan Aizza Medinareswari al-Hamdi) yang telah merelakan waktu yang seharusnya saya berikan kepada mereka, tetapi saya sibukkan untuk merampungkan penulisan buku ini.

Terakhir, tidak ada yang sempurna dari setiap karya cipta manusia, termasuk karya ini. Kebenaran dalam studi ini masih bisa diperdebatkan. Kritik dan saran yang membangun tetap terbuka untuk perbaikan selanjutnya. Besar harapannya, buku ini menjadi rujukan utama tentang paradigma politik Muhammadiyah. Penulis dedikasikan sepenuhnya karya ini untuk khazanah ilmu pengetahuan, terutama mereka yang tertarik dengan topik Muhammadiyah dan politik.

Tamantirto, Bantul, 17 Maret 2020

Ridho Al-Hamdi

Prolog:

Muhammadiyah dan Politik dalam Tinjauan Filosofis

Oleh: Prof. Dr. H. Ahmad Syafi'i Ma'arif, MA
(Ketua Umum Muhammadiyah Periode 1998–2005)

Sebagai organisasi dakwah Islam yang telah berusia lebih dari satu abad, Muhammadiyah memiliki dinamika perjalanan yang panjang dengan dunia politik, terutama politik kekuasaan, politik pemerintahan, politik kepartaian, dan politik kepemiluan, seperti yang dikaji oleh buku ini. Tentu, sikap dan posisi politik Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu dengan satu prinsip utama yang terus dipegang: Muhammadiyah tidak pernah berubah menjadi parpol (partai politik) dan tidak pernah berafiliasi pada kekuatan politik manapun. Berbagai usaha untuk mengubah Muhammadiyah menjadi parpol pun sudah pernah dilakukan, bahkan sejak awal pendiriannya. Namun, percobaan demi percobaan tersebut tidak pernah berhasil. Meskipun begitu, Muhammadiyah juga tidak begitu kaku dalam menjaga hubungan politik dengan pihak manapun, bahkan turut membidani kelahiran sejumlah partai dalam sejarah politik Indonesia, seperti PII, Masyumi, Parmusi, dan PAN. Tentu, keterlibatan Muhammadiyah dalam pendirian PAN tidak seintensif keterlibatannya dalam pendirian PII, Masyumi, dan Parmusi seperti yang telah dijelaskan oleh buku ini.

Sebagai generasi muda yang memiliki konsen keilmuan di bidang ilmu politik, Ridho al-Hamdi berhasil memotret dinamika Muhammadiyah dan politik menjadi sebuah *discourse* ilmiah dalam kerangka analisa filosofis seperti yang Anda akan baca kemudian. Buku ini secara mendalam mampu menginvestigasi perjalanan politik Muhammadiyah sejak

kelahirannya hingga kekinian yang dibagi menjadi dua fase: kesadaran individual (1912–1971) dan kesadaran institusional (1971–2020), di mana kajian lainnya belum mampu melakukan hal serupa seperti yang sudah dilakukan penulis buku ini. Dari proses pembentukan kesadaran politik itulah, Ridho al-Hamdi kemudian menawarkan dua model akal politik Muhammadiyah: akal skripturalis-rasional dan akal substansialis-pragmatis. Semakin menarik lagi ketika penulis buku ini menawarkan gagasan perlunya lembaga *ad hoc* yang menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*), terutama di bidang politik, sehingga lembaga tersebut bisa menjadi tenda besar bagi kader-kader Muhammadiyah yang ingin terjun dalam dunia politik praktis.

“Kesadaran politik yang yang membebaskan” sebagai sebuah paradigma yang ditawarkan oleh penulis buku ini, yang dalam bahasa Thomas S. Kuhn sebagai *normal science*, menjadi menarik dipelajari lebih jauh karena penulis mampu menjelaskan pijakan dan landasan filosofisnya seperti yang telah diuraikan pada Bab 5 buku ini. Karena itu, kajian buku ini secara metodologis sudah cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan referensi bacaan yang cukup kaya, baik itu sumber-sumber lama maupun sejumlah penelitian terdahulu yang lama tidak muncul di masyarakat luas.

Tentu, kekurangan tidak terlepas dari semua karya ilmiah, termasuk buku ini. Buku ini belum mampu menjangkau peristiwa-peristiwa detail, terutama di Muhammadiyah akar rumput, karena potret Muhammadiyah tidak hanya terjadi di tingkat elite saja. Jangkauan terhadap sumber-sumber awal pendirian Muhammadiyah juga tidak begitu banyak. Tentu, ini tidak terlepas dari sumber referensi Muhammadiyah awal yang juga memang sulit ditemukan, dan ini dialami oleh semua peneliti tentang Muhammadiyah. Karena itu, wawancara terhadap sejumlah narasumber menjadi pelengkap yang sudah dilakukan oleh Ridho al-Hamdi.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan isi buku ini, Ridho al-Hamdi sebagai intelektual muda Muhammadiyah sudah berhasil menyajikan sebuah usaha ilmiah tentang paradigma politik Muhammadiyah untuk kemudian dapat dikonsumsi, dikaji, bahkan dikritik oleh masyarakat luas agar dialektika ilmiah tetap hidup terus, agar Muhammadiyah tidak berhenti dalam kejumudan. Di tengah anak muda lainnya yang mungkin lebih senang dengan kegiatan bisnis dan politik praktis yang lebih menjanjikan, Ridho al-Hamdi setidaknya telah memperkaya khazanah keilmuan meskipun secara finansial tidak sebanding dengan para

pebisnis dan aktivis politik tersebut. *Ala kulli hal*, selamat sekali lagi atas terbitnya buku ini. Semoga bermanfaat untuk warga Muhammadiyah dan masyarakat ilmu secara luas. *Tabik*.

Nogotirto, Sleman, 12 Maret 2020

Daftar Isi

Daftar Tabel	5	
Daftar Gambar	8	
Ucapan Terima Kasih	9	
Prolog: Muhammadiyah dan Politik dalam Tinjauan		
Filosofis	11	
Daftar Isi	14	
Bab 1	Pendahuluan	16
	A. Mengapa Studi Ini Menarik?	16
	B. Ruang Lingkup dan Objek Studi Ini.....	18
	C. Bagaimana Studi Ini Dilakukan?	19
	D. Epistemologi dan Paradigma sebagai Pisau Analisa	21
	E. Studi Terdahulu tentang Muhammadiyah dan Politik	27
Bab 2	Metode Kajian Politik Muhammadiyah	31
	A. Metode Fenomenologi.....	32
	B. Metode Induktif-Deduktif.....	34
Bab 3	Jejak Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Reformis	40
	A. Menenal Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Reformis	40
	B. Ketua Umum Muhammadiyah dari Periode ke Periode	42
	C. Jejak Muktamar Muhammadiyah dari 1912 hingga 2020.....	46
	D. Jaringan Kekuatan dan Potensi Muhammadiyah..	49
Bab 4	Asal Mula Politik Muhammadiyah	57
	A. Napas Pembaruan sebagai Sumber Inspirasi.....	58
	B. Kesadaran Pembebasan dari Keterbelakangan	65

	C. Kesadaran Pembebasan dari Penjajahan	70
	D. Kesadaran Pembebasan dari Penetrasi Kristen	74
Bab 5	Sumber Kajian Politik Muhammadiyah	80
	A. Tahap Pembentukan Kesadaran Politik Muhammadiyah	82
	B. Tahap Struktur: Formulasi Akal Politik Muhammadiyah	347
	C. Tahap Nasib: Gagasan Masa Depan Politik Muhammadiyah	378
Bab 6	Kesadaran Politik yang Membebaskan sebagai Paradigma	401
	A. Kesadaran Diri dan Visi Ketuhanan	402
	B. Islam dan Spirit Teologi Pembebasan	412
	C. Visi Islam Berkemajuan	426
	D. Menuju Kesadaran Politik yang Membebaskan	432
Bab 7	Penutup	435
	A. Kesimpulan	435
	B. Implikasi Teoretis dan Praktis	438
	C. Rekomendasi Bagi Civitas Muhammadiyah	439
	D. Pengembangan Studi Relasi Muhammadiyah dan Politik	440
Epilog:	Muhammadiyah dan Kerumitan Politik	443
	A. Politik Nilai	445
	B. Aktualisasi Khittah	449
	C. Peran Kader Politik	453
	D. Kekuatan Strategis	458
	Daftar Singkatan	464
	Daftar Istilah	473
	Peristiwa-peristiwa Penting	475
	Daftar Pustaka	479
	Indeks	494
	Tentang Penulis	509



Bab 1

Pendahuluan

A. Mengapa Studi Ini Menarik?

Mengkaji tentang Muhammadiyah dan politik ibarat menginvestigasi dinamika yang tidak akan pernah selesai dari waktu ke waktu. Dinamika Muhammadiyah dan politik selalu dibatasi oleh ruang dan waktu yang berbeda dari satu era ke era berikutnya. Karena dibatasi oleh ruang dan waktu itulah, kajian tentang Muhammadiyah dan politik selalu menarik untuk terus dibedah agar menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang tertarik pada gerakan Islam. Muhammadiyah sejak awal berdiri hingga kini telah menegaskan diri bukan organisasi politik. Muhammadiyah berkomitmen sebagai gerakan Islam di bidang kemasyarakatan yang menyebarkan dakwah dan *tajdid* dengan karakter paham agama dan ideologi gerakannya yang khas.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Pancasila *Darul Ahdi wasy Syahadah*, yakni negara hasil konsensus nasional yang di atasnya tidak boleh didirikan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Muhammadiyah menyakini, bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan wadah untuk beramal shalih melalui kegiatan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, Muhammadiyah menegaskan bahwa negara yang sejahtera, adil, dan makmur merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.